

ANALISIS SUB-SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001-2010

Oleh:
Yunie Mastuti Handayani¹⁾

¹⁾Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
E-mail : yunie_mastuti@yahoo.com

ABSTRACT

This research is to analyze the advantage of subsectors in Pemalang Regency. The method of this research is Klassen Typology and Location Quotient (LQ) using secondary data, 2001-2010, from Badan Pusat Statistik (BPS) of Central Java Province and Pemalang Regency, and Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, and Aset Daerah (DPPKAD) of Pemalang Regency. The result shows that based on Klassen Typology the subsector which has significant progress and grows rapidly is fishery and based on LQ the basic subsectors are plants for food, plantation, animal husbandry, fishery, mining, electricity, restaurant, building rent, firm service, and private subsector. The conclusion of both analysis shows that fishery is the most advantage subsector in Pemalang.

Keywords: *klassen typology, location quotient, fishery, basic sub-sector*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali 5 (lima) bidang, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah bebas mengatur masalah keuangan dan keputusan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunan. Semakin mandiri suatu daerah maka daerah tersebut semakin berhasil dalam melaksanakan pembangunan

didaerahnya. Pemerintah daerah harus memikirkan cara agar pembangunan didaerahnya dapat berlangsung dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ikut serta melaksanakan kebijakan otonomi daerah, sehingga Kabupaten Pemalang diharapkan mempunyai kemandirian dalam hal menentukan penerimaan keuangan maupun pengeluaran untuk kemajuan pembangunan didaerahnya. Namun, Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai keterbatasan dalam sumber daya pembangunan. Keterbatasan tersebut berupa: tingkat kemandirian fiskal yang sangat kurang, laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah, rendahnya tabungan pemerintah, dan kecilnya proporsi anggaran pembangunan.

Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Tabel 1 menyajikan ringkasan penerimaan daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2007-2011. Selanjutnya gambaran tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2007-2011 dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 1. Ringkasan Penerimaan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011 (dalam juta rupiah)

Tahun	PAD	BHPBP	DAU	DAK	TPD
2007	52.026,51	27.181,5	530.443	9.871	667.105,39
2008	53.748,79	33.740,39	577.864,69	9.871	728.278,85
2009	69.871,27	36.460,05	609.478,07	34.670	793.640,14
2010	70.610,74	39.992,55	619.895,59	61.660,2	910.512,68
2011	77.849,38	39.827,19	672.429,59	67.464,6	1.174.141,78

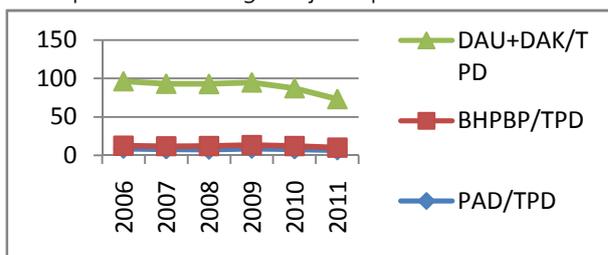
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011 (dalam persen)

Tahun	PAD/TPD	BHPBP/TPD	DAU+DAK/TPD
2007	7,8	4,1	81,0
2008	7,4	4,6	80,7
2009	8,8	4,6	81,2
2010	7,8	4,4	74,9
2011	6,6	3,4	63,0
Rata-rata	7,7	4,2	76,16

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang(diolah)

Dari perhitungan dalam Tabel 2, diketahui bahwa Kabupaten Pemalang merupakan daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah. Rata-rata tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Pemalang selama tahun 2007-2011 adalah sebesar 7,68 persen yang diperoleh dari persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Dapat diartikan bahwa kemampuan PAD Kabupaten Pemalang dalam membiayai pembangunannya sendiri hanya sebesar 7,68 persen. Berdasarkan kualifikasi tim Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri dalam Triastuti (2005), kemandirian fiskal Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori sangat kurang. Derajat kemandirian fiskal di Kabupaten Pemalang disajikan pada Grafik 1.



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang (diolah)

Grafik 1. Rekapitulasi Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011(dalam persen)

Dari Grafik 1 terlihat bahwa Kabupaten Pemalang mempunyai tingkat ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat sangat tinggi, namun secara bertahap ketergantungan tersebut menurun.

Pembangunan yang dilaksanakan daerah lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Pembangunan daerah dinilai sangat strategis dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral pembangunan nasional dan pembangunan daerah diakui berhasil mendorong peningkatan pemerintahan, stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonominya, sekaligus sebagai indikator untuk menggambarkan tentang sejauhmana aktivitas perekonomian daerah pada waktu tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan PDRB menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu wilayah pada jangka waktu tertentu.

PDRB di Indonesia pada dasarnya terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu : (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik dan air minum; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel, restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; (9) jasa-jasa.

Kabupaten Pemalang memiliki PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 secara rata-rata dari tahun 2006-2010 sebesar Rp. 3.149.994,06 milyar. PDRB Kabupaten Pemalang sangat dipengaruhi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran terutama sub-sektor perdagangan besar dan eceran. Selama kurun waktu tahun 2006-2010, PDRB Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sub-sektor perdagangan besar dan eceran.

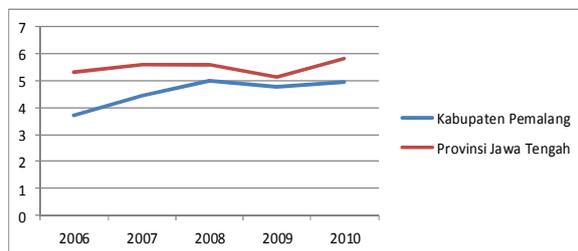
Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kabupaten Pemalang pada tahun 2006-2010 adalah sebesar 4,58 persen, dimana lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,50 persen). Secara lebih lengkap perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dijelaskan melalui Tabel 3.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2010 (dalam persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	Kabupaten Pemalang	Provinsi Jawa Tengah
2006	3,72	5,33
2007	4,47	5,59
2008	4,99	5,61
2009	4,78	5,14
2010	4,94	5,84
Rata-rata	4,58	5,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang (diolah)

Untuk memperjelas kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006-2010 dapat dijelaskan dalam Grafik 2.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Grafik 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2010 (dalam persen)

Berdasarkan Grafik 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Namun, dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang terus meningkat.

Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan sejumlah biaya. Biaya tersebut dapat berasal dari APBD atau tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah yaitu selisih dari pendapatan daerah dikurangi belanja

rutinnya. Pada Tabel 4 disajikan ringkasan tabungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2007-2011.

Tabungan pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun 2007 sebesar Rp. 91.098,42 (juta) dan tiap tahun terus menurun hingga pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 11.657,99 (juta), namun pada tahun 2011 meningkat sebesar 593 persen yaitu Rp. 80.854,59 (juta). Sedangkan alokasi APBD yang digunakan untuk anggaran pembangunan disajikan pada Tabel 5.

Dari Tabel 5 terlihat bahwa proporsi APBD Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk anggaran pembangunan relatif kecil, rata-rata anggaran pembangunan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2007-2011 hanya sebesar Rp 145.753,96 (juta) atau sebesar 15,81 persen dari total belanja Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Melihat kondisi Kabupaten Pemalang yang mempunyai sumber daya pembangunan terbatas (tingkat kemandirian fiskal sangat kurang, laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada Provinsi Jawa, rendahnya tabungan pemerintah dan kecilnya proporsi anggaran pembangunan), maka pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang harus difokuskan pada pembangunan sub-sektor yang dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sub-sektor lainnya atau perekonomian secara menyeluruh. Sub-sektor yang memberikan dampak pengganda terhadap sub-sektor lainnya disebut sub-sektor unggulan. Pengembangan sub-sektor unggulan akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah secara optimal (Kuncoro, 2004). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukan sub-sektor unggulan (*leading sector*) di suatu daerah atau wilayah.

Tabel 4. Tabungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011 (juta rupiah)

Tahun	Pendapatan	Belanja Rutin	Tabungan Pemerintah
2007	667.105,39	576.006,97	91.098,42
2008	728.278,85	689.284,44	38.994,41
2009	793.640,14	763.137,19	30.502,95
2010	910.512,68	898.854,69	11.657,99
2011	1.174.141,78	1.093.287,19	80.854,59
Rata-rata	854.735,77	804.114,09	50.621,67

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang (diolah)

Tabel 5. Proporsi Anggaran Pembangunan pada APBD Kabupaten Pemalang tahun 2007-2011

Tahun	Belanja Modal (Juta Rp)	Total Belanja (Juta Rp)	BM/TB (%)
2007	166.489,6	742.496,57	22,42
2008	142.194,01	831.478,45	17,10
2009	130.610,64	893.747,83	14,61
2010	106.219,88	1.005.074,57	10,57
2011	183.255,67	1.276.542,86	14,36
Rata-rata	145.753,96	949.868,06	15,81

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang (diolah)

Dari paparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk menentukan sub-sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Pemalang sehingga sub-sektor unggulan tersebut dapat dikembangkan untuk mendorong sub-sektor yang lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dengan meningkatnya PAD dan pertumbuhan ekonomi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan pelaksanaan pelayanan publik lebih efisien, karena pemerintah daerah lebih dekat dan lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Otonomi daerah juga mengharuskan pemerintah daerah lebih mandiri dalam hal pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Pembangunan yang dilaksanakan daerah lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi karena terjadinya keterbelakangan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan daerah membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. Sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang sangat terbatas (tingkat kemandirian fiskal yang sangat kurang, laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah, rendahnya tabungan pemerintah dan kecilnya proporsi anggaran pembangunan) sehingga pembangunan harus dilaksanakan pada sub-sektor yang mempunyai efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian, yaitu sub-sektor unggulan. Sub-sektor unggulan yang

dimiliki oleh suatu daerah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong pengembangan sub-sektor yang lain.

PDRB suatu daerah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sub-sektor

Analisis ini untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah (Kabupaten Pemalang) dengan mengacu pada perekonomian daerah yang lebih tinggi (Provinsi Jawa Tengah). Hasil analisis akan menunjukkan posisi sub-sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas : sub-sektor maju dan tumbuh pesat, sub-sektor maju tapi tertekan, sub-sektor berkembang cepat dan sub-sektor tertinggal.

2. Sub-sektor Basis dan Non Basis

Analisis ini untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor dan non ekspor. Hasil analisis akan menunjukkan posisi sub-sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas sub-sektor basis dan sub-sektor non basis.

METODE ANALISIS

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder selama periode tahun 2001-2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang.

2. Alat Analisis

a. Analisis Tipologi Klassen

Digunakan untuk memperoleh klasifikasi pertumbuhan sub-sektor perekonomian wilayah Kabupaten Pemalang. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sub-sektor perekonomian Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan sub-sektor perekonomian Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah referensi.

Analisis ini menghasilkan 4 (empat) klasifikasi sub-sektor dengan karakteristik yang berbeda (Sjafrizal, 2008) sebagai berikut:

Tabel 6. Klasifikasi Sub-sektor PDRB Menurut Tipologi Klassen

Kuadran I Sub-sektor maju & tumbuh pesat $St > S$ dan $SKt > SK$	Kuadran II Sub-sektor maju tapi tertekan $St < S$ dan $SKt > SK$
Kuadran III Sub-sektor berkembang cepat $St > S$ dan $SKt < SK$	Kuadran IV Sub-sektor tertinggal $St < S$ dan $SKt < SK$

Keterangan:

- S : laju pertumbuhan sub-sektor tersebut dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah
 St : laju pertumbuhan sub-sektor tertentu dalam PDRB Kabupaten Pemalang
 SK : kontribusi sub-sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
 SKt : kontribusi sub-sektor terhadap PDRB Kabupaten Pemalang

b. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Digunakan untuk menentukan sub-sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Pemalang. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sub-sektor basis dapat dikatakan sebagai sub-sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sub-sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val (dalam Kuncoro, 2004) sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\frac{PDRB P,i}{\sum PDRB P}}{\frac{PDRB JT,i}{\sum PDRB JT}}$$

Dimana :

- PDRB P,i = PDRB sub-sektor i di Kab Pemalang pada tahun tertentu
 PDRB P = total PDRB di Kab Pemalang pada tahun tertentu
 PDRB JT,i = PDRB sub-sektor i di Prov Jawa Tengah pd tahun tertentu
 PDRB JT = total PDRB di Prov Jawa Tengah pada tahun tertentu

Ada 3 (tiga) kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh, yaitu :

LQ = 1, tingkat spesialisasi sub-sektor i di Kabupaten Pemalang adalah sama dengan sub-sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

LQ > 1 ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sub-sektor i di Kabupaten Pemalang lebih besar dibandingkan dengan sub-sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

LQ < 1 ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sub-sektor i di Kabupaten Pemalang lebih kecil dibandingkan dengan sub-sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sub-Sektor Perekonomian Wilayah Kabupaten Pemalang

Tabel 7 menyajikan data rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sub-sektor PDRB Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang tahun 2001-2010 tanpa migas. Dikarenakan di Kabupaten Pemalang tidak terdapat industri migas, maka hanya PDRB Kabupaten Pemalang tanpa migas yang akan dianalisis.

Sub-sektor industri tanpa migas merupakan sub-sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Pemalang tanpa migas, diikuti oleh sub-sektor perdagangan besar dan eceran, sub-sektor tanaman bahan makanan, serta sub-sektor restoran. Sedangkan sub-sektor PDRB Kabupaten Pemalang tanpa migas yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah sub-sektor komunikasi diikuti sub-sektor listrik, sub-sektor hotel dan sub-sektor pemerintahan umum.

Tabel 8 menunjukkan bahwa klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Pemalang tanpa migas tahun 2001-2010 berdasarkan Tipologi Klassen, hanya terdapat satu sub-sektor yang masuk kedalam kategori sub-sektor maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu sub-sektor perikanan. Sub-sektor perikanan memberikan kontribusi rata-rata terhadap PDRB sebesar 1,58 persen dan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,4.

Sementara itu sub-sektor yang termasuk dalam kategori sub-sektor maju tapi tertekan adalah sub-sektor tanaman bahan makanan, sub-sektor tanaman perkebunan, sub-sektor listrik, sub-sektor restoran, sub-sektor sewa bangunan, sub-sektor jasa perusahaan, serta sub-sektor swasta.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sub-sektor PDRB Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2001-2010 tanpa Migas

No	Sub-sektor	Jawa Tengah		Pemalang	
		Rata-rata Pertumbuhan (S)	Rata-rata Kontribusi (Sk)	Rata-rata Pertumbuhan (Si)	Rata-rata Kontribusi (Ski)
1	Pertanian				
	a. Tanaman Bahan Makanan	2.43	13.13	1.87	18.57
	b. Tanaman Perkebunan	8.96	1.57	1.06	4.84
	c. Peternakan & hasilnya	4.97	2.84	2.07	2.83
	d. Kehutanan	0.63	0.46	1.95	0.08
	e. Perikanan	0.03	1.24	2.40	1.58
2	Pertambangan dan Penggalian				
	a. Pertambangan tanpa Migas	1.61	0	-	-
	b. Penggalian	9.37	1.13	5.88	1.09
3	Industri Pengolahan				
	a. Industri tanpa migas	6.41	24.24	3.93	23.06
4	Listrik, Gas & Air Bersih				
	a. Listrik	9.53	0.79	8.5	0.89
	b. Air Bersih	7.84	0.14	2.88	0.01
5	Bangunan	9.47	4.92	3.33	2.75
6	Perdagang, Hotel & Restoran				
	a. Perdagang besar & eceran	15.74	21.93	5.42	18.89
	b. Hotel	15.42	0.47	7.81	0.05
	c. Restoran	15.63	3.76	6.06	7.83
7	Pengangkutan & Komunikasi				
	a. Pengangkutan	23.74	5.11	3.02	3.04
	b. Komunikasi	25.13	1.54	10.04	0.6
8	Keu, Persewaan & Jasa Perus				
	a. Bank	21.11	0.51	7.07	0.29
	b. Lemb keu tanpa bank	16.95	0.63	6.1	0.33
	c. Jasa penunjang keu	1871.94	0.07	-	-
	d. Sewa Bangunan	17.02	3.06	3.54	3.19
	e. Jasa Perusahaan	18.35	0.18	6.04	0.19
9	Jasa-jasa				
	a. Pemerintahan Umum	19.56	9.36	7.11	6.74
	b. Swasta	22.42	2.9	5.83	3.16

Sub-sektor yang masuk dalam kategori sub-sektor yang potensial atau masih dapat berkembang adalah sub-sektor kehutanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,08 persen per tahun dan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,95. Sedangkan sub-sektor yang masuk dalam kategori sub-sektor relatif tertinggal adalah sub-sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub-sektor penggalian, sub-sektor industri tanpa migas, sub-sektor air bersih, sektor bangunan, sub-sektor perdagangan besar dan eceran, sub-sektor hotel, sub-sektor pengangkutan, sub-sektor komunikasi, sub-sektor bank, sub-sektor lembaga keuangan tanpa bank, serta sub-sektor pemerintahan umum.

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sub-sektor ekonomi dalam

PDRB yang dapat digolongkan kedalam sub-sektor basis dan non basis. LQ merupakan perbandingan besarnya peranan suatu sub-sektor di Kabupaten Pemalang terhadap besarnya peranan sub-sektor tersebut di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Nilai $LQ > 1$ berarti bahwa peranan suatu sub sektor di Kabupaten lebih dominan dibandingkan sub sektor di tingkat Provinsi dan sebaliknya bila nilai $LQ < 1$ berarti peranan sub sektor tersebut lebih kecil di Kabupaten dibandingkan peranannya di tingkat Provinsi.

Nilai LQ merupakan dasar untuk menentukan sub sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena sub sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan didalam daerah dan juga dapat memenuhi kebutuhan di daerah lain (surplus).

Tabel 8. Klasifikasi Sub-sektor PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 2001-2010 tanpa Migas Berdasarkan Tipologi Klassen

<p style="text-align: center;"><u>Kuadran I</u></p> <p>Sub-sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (<i>developed sub sector</i>) $Si > S$ dan $Ski > Sk$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-sektor perikanan 	<p style="text-align: center;"><u>Kuadran II</u></p> <p>Sub-sektor maju tapi tertekan (<i>stagnant sub sector</i>) $Si < S$ dan $Ski > Sk$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-sektor tanaman bahan makanan - Sub-sektor tanaman perkebunan - Sub-sektor listrik - Sub-sektor restoran - Sub-sektor sewa bangunan - Sub-sektor jasa perusahaan - Sub-sektor swasta
<p style="text-align: center;"><u>Kuadran III</u></p> <p>Sub-sektor potensial atau masih dapat berkembang (<i>developing sub sector</i>) $Si > S$ dan $Ski < Sk$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-sektor kehutanan 	<p style="text-align: center;"><u>Kuadran IV</u></p> <p>Sub-sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sub sector</i>) $Si < S$ dan $Ski < Sk$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-sektor peternakan dan hasil-hasilnya - Sub-sektor penggalian - Sub-sektor industry tanpa migas - Sub-sektor air bersih - Sektor bangunan - Sub-sektor perdagangan besar dan eceran - Sub-sektor hotel - Sub-sektor pengangkutan - Sub-sektor komunikasi - Sub-sektor bank - Sub-sektor lembaga keuangan tanpa bank - Sub-sektor pemerintahan umum

Bila ditinjau indeks LQ Kabupaten Pemalang tanpa migas menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) sub-sektor basis di Kabupaten Pemalang, yaitu sub-sektor tanaman bahan makanan, sub-sektor tanaman perkebunan, sub-sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub-sektor perikanan, sub-sektor penggalian, sub-sektor listrik, sub-sektor restoran, sub-sektor sewa bangunan, sub-sektor jasa perusahaan, serta sub-sektor swasta.

Sub-sektor tanaman bahan makanan dengan nilai LQ sebesar 1,4692 merupakan kontribusi dari beberapa komoditi seperti padi, jagung, ketela pohon dan ketela rambat. Untuk sub-sektor tanaman perkebunan dengan nilai LQ sebesar 3,2872 merupakan nilai LQ terbesar didominasi oleh komoditi kelapa sayur, cengkeh, teh dan gelagah arjuna.

Nilai LQ sub-sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 1,1057 didominasi oleh ternak kambing, domba, sapi potong dan kerbau.

Sedangkan sub-sektor perikanan dengan nilai LQ sebesar 1,37 didominasi oleh perikanan laut dan perikanan darat. Sub-sektor penggalian mempunyai nilai LQ sebesar 1,0537. Sub listrik mempunyai nilai LQ sebesar 1,2417. Sedangkan untuk sub-sektor restoran nilai LQ sebesar 2,1106. Sub-sektor sewa bangunan mempunyai nilai LQ sebesar 1,0739. Nilai LQ sub-sektor jasa perusahaan sebesar 1,0362 dan untuk

sub-sektor swasta mempunyai nilai LQ sebesar 1,1470.

Meskipun sub-sektor basis merupakan sub-sektor yang potensial untuk dikembangkan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang, akan tetapi peran sub-sektor non basis tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena adanya sub-sektor basis akan dapat membantu pengembangan sub-sektor non basis menjadi sub-sektor basis baru.

3. Analisis Sub-sektor Unggulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis Tipologi Klassen dan analisis Location Quotient (LQ), maka dapat ditentukan sub-sektor yang menjadi sub-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang. Pada Tabel 9 disajikan hasil analisis penentuan sub-sektor unggulan pada Kabupaten Pemalang

Hasil analisis per sub-sektor PDRB menunjukkan bahwa pada Kabupaten Pemalang hanya terdapat satu sub-sektor yang merupakan sub-sektor unggulan, yaitu sub-sektor perikanan. Sub-sektor perikanan memiliki beberapa komoditi yang layak dikembangkan, sehingga kontribusinya terhadap produksi perikanan meningkat dan secara keseluruhan akan meningkatkan PDRB Kabupaten Pemalang. Adapun produksi sub-sektor perikanan tercantum pada Tabel 10.

Tabel 9. Analisis Sub-sektor Unggulan Kabupaten Pemalang

No	Sub-sektor	Tipologi Klassen		Location Quotient (LQ)	
		Paramater	Makna	Parameter	Makna
1	Pertanian				
a.	Tan Bahan Makanan	Kuadran II	Maju tapi tertekan	> 1	Basis
b.	Tan Perkebunan	Kuadran II	Maju tapi tertekan	> 1	Basis
c.	Peternakan & hasilnya	Kuadran IV	Relatif tertinggal	> 1	Basis
d.	Kehutanan	Kuadran III	Potensial	< 1	Non basis
e.	Perikanan	Kuadran I	Maju & tumbuh cepat	> 1	Basis
2	Pertambangan & Penggalian				
a.	Pertambangan tanpa migas	-	-	-	-
b.	Penggalian	Kuadran IV	Relatif tertinggal	> 1	Basis
3	Industri Pengolahan				
a.	Industri tanpa migas	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
4	Listrik, gas & air bersih				
a.	Listrik	Kuadran II	Maju tapi tertekan	> 1	Basis
b.	Air bersih	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
5	Bangunan	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
6	Perdag, hotel & restoran				
a.	Perdag besar & eceran	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
b.	Hotel	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
c.	Restoran	Kuadran II	Maju tapi tertekan	> 1	Basis
7	Pengangkutan & Komunikasi				
a.	Pengangkutan	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
b.	Komunikasi	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
8	Keu, Persewaan & Js Perush				
a.	Bank	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
b.	Lmbg keu tnpa bank	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
c.	Js penunjang keu	-			
d.	Sewa bangunan	Kuadran II	Maju tapi tertekan	> 1	Basis
e.	Jasa perusahaan	Kuadran II	Maju tapi tertekan	> 1	Basis
9	Jasa-jasa				
a.	Pemerintahan umum	Kuadran IV	Relatif tertinggal	< 1	Non basis
b.	swasta	Kuadran II	Maju tapi tertekan	> 1	Basis

Tabel 10. Produksi Sub-sektor Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2009-2010 (dalam kg)

No	Jenis Ikan	Tahun	
		2009	2010
1	Ikan laut	9.680.249	6.789.660
a.	Pelagis	3.605.741	2.841.584
b.	Demersal	2.428.644	3.046.957
c.	Lain-lain	3.645.864	901.119
2	Ikan darat	2.987.803	3.059.918
a.	Bandeng	1.720.412	1.712.365
b.	Udang	335.115	345.330
c.	Kepiting	253.100	253.450
d.	Rucah	120.176	105.773
e.	Rumput laut	559.000	643.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Sub-sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Produksi yang dihasilkan dari kegiatan perikanan laut pada tahun 2010 adalah Demersia merupakan salah satu jenis yang memproduksi tinggi, yaitu sekitar 44,88 persen dari total produksi perikanan laut. Pada tahun 2010, produksi usaha budidaya perikanan darat di tambak yang terbesar adalah bandeng sedangkan yang terkecil adalah rucah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, sebagai berikut : menurut Tipologi Klassen, yang termasuk dalam klasifikasi sub-sektor maju dan tumbuh pesat adalah sub-sektor perikanan; menurut perhitungan indeks Location Quotient (LQ), yang merupakan sub-sektor basis (LQ > 1), adalah sub-sektor tanaman bahan makanan, sub-sektor tanaman perkebunan, sub-sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub-sektor perikanan, sub-sektor penggalian, sub-sektor listrik, sub-sektor restoran, sub-sektor sewa bangunan, sub-sektor jasa perusahaan, dan sub-sektor swasta; berdasarkan hasil perhitungan kedua alat analisis menunjukkan bahwa sub-sektor yang merupakan sub-sektor unggulan adalah sub-sektor perikanan.

Saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Pematang adalah agar Pemerintah Kabupaten Pematang lebih mengutamakan pengembangan sub-sektor unggulan dengan tidak mengabaikan sub-sektor lain dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sub-sektor perikanan sebagai sub-sektor unggulan perlu mendapatkan prioritas pengembangan sehingga memberikan dampak yang tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2008. *Ekonomi Archipelago*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Apriliyanto, DP. 2003. Identifikasi Potensi Ekonomi Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 1. Maret 2003. Halaman 24-38. Pekalongan. FE Unikal.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Regional*. Yogyakarta. BPFE.
- Badan Pusat Statistik. 2006-2010. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pematang*. Pematang. Badan Pusat Statistik.
- Baharudin, Rudi. 1999. Pengembangan Wilayah Potensi Provinsi DIY (Pendekatan Teoritis). *Jurnal Ekonomi*. Volume 4. Nomor 2. VIII. Yogyakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Kedua. Jakarta : LP3ES.
- Fachrurrazy. 2009. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB*. [Tesis]. Program Pascasarjana USU. Medan.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta. UPP UMP YKPN.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta. Erlangga.
- Kuncoro, M. 2012. *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Marhayanie. 2003. *Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan*. [Tesis]. Program Pascasarjana USU. Medan.
- Modul 4. Tipologi Klassen. <http://www.scribb.com/doc/2908449/Modul-4-Tipologi-Klassen>. diakses pada tanggal 16 Juli 2012.
- Priyarsono, DS. 2007. *Ekonomi Regional*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Rachbini, DJ. 2001. *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional Terjemahan Paul Sitohang*. Edisi Revisi. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI.
- Sabana, C. 2007. *Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah* [Tesis]. Program Pascasarjana UNDIP. Semarang.
- Setyowati, Erna dan Trisnawati, Rina. 2003. Analisis Potensi Daerah Untuk Mengembangkan Wilayah di Eks-Karisidenan Surakarta Menggunakan Teori Pusat Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 2. Nomor 2. September 2003. Surakarta : FE UMS.

- Singarimbun, dan Effendi, Sofian. 1989. *Metodologi Penelitian Survei*. PT. Pustaka LP3ES.Jakarta
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma.Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Boduose Media.Padang.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.Bandung
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Bima Grafika.Jakarta.
- Supangkat, Harlan. 2002. *Analisis Penentuan Sektor Prioritas dalam Peningkatan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan dengan Menggunakan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB*. [Tesis]. Program Pascasarjana USU. Medan.
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional*: PT. Bumi Aksara.Jakarta.
- Taufiq, M dan Syrod, S. 2002. Potensi Relatif Sektor-sektor Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1. Nomor 1. Juni. Halaman 1-13.
- Triastuti, MD dan Ratminto. 2005. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Sosio Sains*. Volume 18. Nomor 2. Halaman 203-310.